



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 52/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2019

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 26 Desember 2019

Jumlah Laporan KY Menurun Dibandingkan Tahun Lalu

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima 1.544 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Jumlah ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.722 laporan. KY berharap, penurunan kuantitas laporan ini karena adanya peningkatan pelayanan di pengadilan dan kualitas putusan pengadilan.

Dari tahun ke tahun, jumlah laporan yang masuk masih didominasi perkara perdata dan pidana yang merupakan ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif. Di tahun 2019, perkara perdata yang masuk berjumlah 686 laporan, sementara tahun 2018 berjumlah 783 laporan. Untuk perkara pidana berjumlah 464 laporan, sementara di tahun 2018 berjumlah 507. Perkara lainnya di tahun 2019 yang dilaorkan ke KY, yaitu perkara agama (90 laporan), Tata Usaha Negara (82 laporan), Tipikor (50 laporan), pemilu (36 laporan), perselisihan hubungan industrial (34 laporan), dan lingkungan (30 laporan).

Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi. Pada tahun 2019 ini, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan adalah sebanyak sebanyak 224 laporan. Sementara di tahun 2018 berjumlah 412 laporan.

Penyebab rendahnya persentase laporan masyarakat yang dapat diproses karena beberapa alasan, yaitu kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi, laporan bukan kewenangan Komisi Yudisial dan diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung, serta banyak laporan yang ditujukan ke KY berisi permohonan untuk dilakukan pemantauan persidangan.

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, sidang panel hingga sidang pleno, Anggota KY menjatuhkan sanksi kepada 130 hakim di tahun 2019. Jumlah usulan sanksi ini meningkat signifikan dibandingkan di tahun 2018 yang hanya berjumlah 63 sanksi. KY mencatat usulan sanksi tetap didominasi sanksi ringan.

Adapun rincian sanksi di tahun 2019, yaitu: sebanyak 91 hakim dijatuhi sanksi ringan, 31 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 8 hakim dijatuhi sanksi berat. Sementara di tahun 2018, KY menjatuhkan sanksi ringan terhadap 40 hakim, sanksi sedang terhadap 12 hakim, dan sanksi berat terhadap 11 hakim.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi terkait rekomendasi sanksi KY adalah MA tidak melaksanakan sebagian usul sanksi yang disampaikan oleh KY. Adanya tumpang tindih penanganan tugas pengawasan antara KY dan MA juga menjadi problem yang dihadapi. Selain itu, hakim terlapor maupun saksi dari pihak pengadilan juga tidak memenuhi panggilan KY.

Jaja Ahmad Jayus

Ketua Komisi Yudisial

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

www.komisiyudisial.go.id

email: humas@komisiyudisial.go.id

1



#KinerjaKY

PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2 JANUARI - 23 DESEMBER 2019

JUMLAH LAPORAN MASYARAKAT DITERIMA KOMISI YUDISIAL

891

Surat
Tembusan

2435

Laporan
Masyarakat

1544

286 Laporan



Datang langsung ke KY

893 Laporan



Jasa pengiriman

281 Laporan



Laporan online

84 Laporan



Penerimaan Informasi

1544

<https://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id>

Jumlah Penerimaan Tahun 2018

1722

@KomisiYudisial

@komisiyudisialri

@komisiyudisialri

humas@komisiyudisial.go.id

www.komisiyudisial.go.id



JUMLAH LAPORAN YANG DIREGISTRASI



	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
— Grafik 1	28	17	16	17	14	13	23	21	28	14	21	11



Penanganan laporan masyarakat dilakukan oleh Tim Penanganan Laporan yang terdiri dari dua tim:

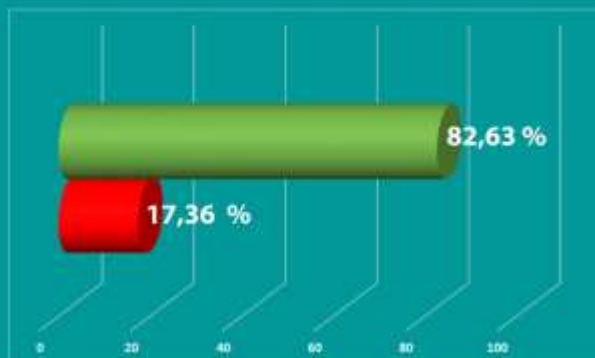
- Tim Penanganan Laporan Pendahuluan (TPP);
- Tim Penanganan Laporan Lanjutan (TPL).

TPP melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister. Ini dari tahap ini untuk melihat berwenang atau tidaknya Komisi Yudisial menangani laporan masyarakat. Apabila laporan bukan termasuk dalam wewenang dan tugas KY, maka TPP dapat mengusulkan untuk meneruskan laporan kepada lembaga yang berwenang.





PELAKSANAAN SIDANG PLENO



478



Terbukti melanggar KEPPH
(83 Laporan)



Tidak terbukti melanggar KEPPH
(395 Laporan)

USULAN SANKSI SAMPAI 23 DESEMBER 2019 (130 HAKIM)



70%

a

Sanksi ringan (91 hakim)

- Teguran lisan (18);
- Teguran tertulis (35);
- Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis (38).



Usulan sanksi
2018
63 Sanksi



23,84%

b

Sanksi sedang (31 hakim)

- Non palu selama 2 bulan (2);
- Non palu selama 1 bulan (1);
- Non palu selama 6 bulan (6);
- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun (14);
- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun (4);
- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (Enam) bulan (1);
- Penurunan Gaji Sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun (3).



6,15%

c

Sanksi berat (8 hakim)

- Pemberhentian tetap dengan hak pensiun (2);
- Pemberhentian tetap tidak dengan hormat (4);
- Non palu selama 2 tahun (2).



@KomisiYudisial



@komisiyudisialri



@komisiyudisialri



humas@komisiyudisial.go.id



www.komisiyudisial.go.id